



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.


Pasal 3


- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

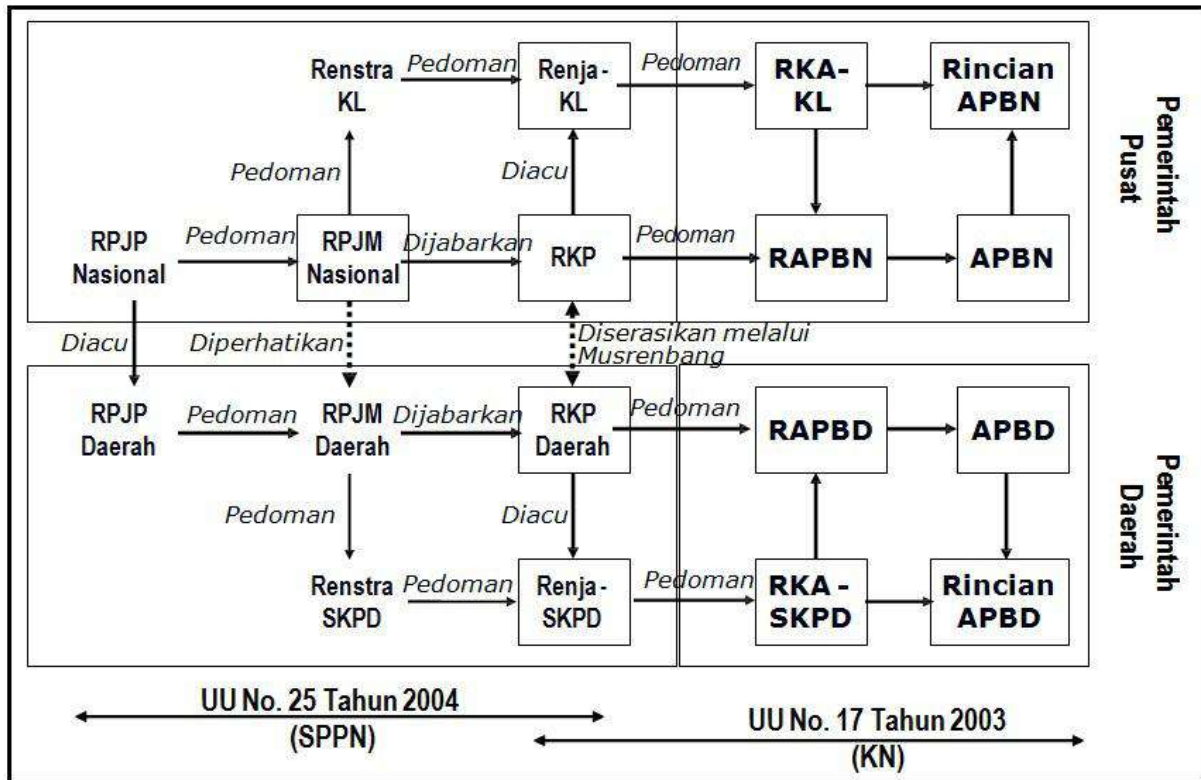
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pajangan. Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024;
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025		
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)	
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%	
4.01.04.5.01	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan		-	-	-			100	100		
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-	-	-	-	-	4	4	-	
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%	
04.01.04.56.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	4	-	-	-	-	-	-	0%	
		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di Kapanewon	3	3	-	-	-	-	3	100%	
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6	2	3	3	100	-	5	83%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	80	79.53	80	82.07	102.59	82	243.6	305%
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6	9	-	-	-	-	9	150%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	7	7	7	100	7	21	75%
7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	7	11	-	-	-	-	11	157%
		Dokumen Keuangan	65	65	-	-	-	-	65	100%
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	5	5	5	100	5	15	75%
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	79.53	80	89.02	89.02	80	248.55	249%
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	-	28	-	-	-	-	28	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400	16	16	16	100	16	48	3%
7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	-	228	-	-	-	-	228	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12	100	12	36	75%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88	22	22	22	100	22	66	75%
7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	79.53	80	100.00	100.00	80	259.53	260%
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	4	4	4	100	4	12	100%
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	80	79.53	80	99.51	99.51	80	259.04	324%
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	-	30	-	-	-	-	30	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	-	19	-	-	-	-	19	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	12	300%
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	-	44	-	-	-	-	44	-
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	-	7	-	-	-	-	7	-
		Penggandaan	-	21.952	-	-	-	-	21.952	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undagn Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- 48	13 12	- -	- -	- -	- -	13 12	- 25%
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	40	108	-	-	-	-	108	270%
		perjalanan dinas dalam daerah	280	274	-	-	-	-	274	98%
		perjalanan dinas luar daerah	5	4	-	-	-	-	4	80%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650	124	50	50	100	50	224	34%
7.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	2	2	-	-	-	-	2	100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	1	1	1	100	1	3	150%
7.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	300%
7.01.01.02. 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%
7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	pengadaan mebeler	2	2	-	-	-	-	2	100%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	3	1	1	100	0	4	50%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin	5	5	-	-	-	-	5	100%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	1	1	100	0	6	30%
7.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	99.77	99.77	100	299.7663669	300%
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300	200	-	-	-	-	200	67%
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	12	12	-	-	-	-	12	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75%
7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	6	-	-	-	-	6	20%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75%
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor	1	12	-	-	-	-	12	1200%
		laporan keamanan dan ketertiban	2	24	-	-	-	-	24	1200%
		pembayaran BPJS ketenagakerjaan	60	60	-	-	-	-	60	100%
		laporan kegiatan pelayanan umum	2	24	-	-	-	-	24	1200%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	5	5	5	100	5	15	94%
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	98.77	98.77	100	298.77	299%
7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	6	7	-	-	-	-	7	117%
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	8	8	8	100	8	24	75%
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3	3	-	-	-	-	3	100%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12	3	3	3	100	3	9	75%
07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92	95	90	99.83	99.83	90	284.71	309%
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	92	90	90	100.00	100.00	90	280	304%
07.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompinkap	4	7	-	-	-	-	7	175%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	4	4	4	100	4	12	75%
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan intensifikasi PAD	1	1	-	-	-	-	1	100%
		laporan pembinaan pemerintahan Kalurahan	1	4	-	-	-	-	4	400%
		monografi kapanewon	2	1	-	-	-	-	1	50%
		pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan	4	3	-	-	-	-	3	75%
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29	7	11	11	100	11	29	100%
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100	90	90	99.57	99.57	90	279.57	280%
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan survey kepuasan masyarakat	2	21	-	-	-	-	21	1050%
		masyarakat yang dilayani	5.050	5.520	-	-	-	-	5.520	109%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8	2	2	2	100	2	6	75%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	3	-	-	-	-	3	150%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	8	10	10	100	10	28	70%
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	35	29	-	-	-	-	29	83%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	24	25	25	100	25	74	154%
07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	88	100	88	100.00	100.00	88.00	288	327%
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	11	7	-	-	-	-	7	64%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	4	5	5	100	3	12	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100.00	100.00	100	300	300%
07.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	laporan penanggulangan bencana	2	4	-	-	-	-	4	200%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024			Target Kinerja 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan kejadian trantibum Kapanewon	2	6	-	-	-	-	6	300%
		laporan pemberdayaan linmas/FPRB	-	1	-	-	-	-	1	-
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	12	5	5	100	6	23	115%
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	100	100	100	100	100	300	300%
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	300	300%
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	12	17	-	-	-	-	17	141.67%
07.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12,000	70	50	50	100	40	160	133.33%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kapanewon Pajangan Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
-	-	NIHIL

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanedwon, Forkompinkap) Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<p>Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait</p> <p>Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.</p> <p>Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.</p>
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara ASN dan Non ASN kapanewon
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara pejabat struktural di kapanewon
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<p>Penyusunan Perencanaan Kegiatan tepat waktu</p> <p>Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan</p> <p>Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.</p> <p>Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.</p>
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	<p>Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kapanewon</p> <p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pejabat struktural Kapanewon</p> <p>Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan;</p> <p>Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi;</p>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pejabat stryktural dan staf kapanewon
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daftar penerimaan Gaji dan tunjangan sudah ada di aplikasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kerjasama yang baik antar anggota pengelola keuangan, barang, petugas urusan kepegawaian, dan pengelola website kapanewon.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Keerjasa yang baik antara pelaksana teknis dan pengelola keuangan.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh karyawan/wati/ pegawai kapanewon
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh karyawan/wati/ pegawai kapanewon
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor yang memadai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jarak dekat dengan penyedia/ pihak ketiga
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan kerjasama yang baik dari forkompinkap, kalurahan, lintas sektoral, dan stekaholder taerkait.
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya sarana prasarana yang menunjang pengarsipan dokumen.
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan dan pendamping.
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya rekanan yang memenuhi kualifikasi
	Pengadaan Mebel	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Barang mudah didapatkan/diperoleh
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Barang mudah didapatkan/diperoleh</p> <p>Perencanaan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Tagihan sesuai dengan perencanaan</p> <p>Pembayaran lebih mudah dengan menggunakan CMS</p> <p>Penyedia jasa / pihak ketiga mudah didapat</p> <p>Perencanaan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Kerjasama yang antara kapanewon dan tenga Non ASN</p> <p>Dilaksanakan berdasarkan inventarisasi BMD yang harus diperbaiki dan kepedulian akan kelayakan BMD</p> <p>Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan</p> <p>Kepedulian pengguna Kendaraan Dinas akan kelayakan kendaraan dinas yang dipakainya.</p> <p>Tersedianya rekanan yang berpengalaman;</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.</p> <p>Inventarisasi gedung yang memerlukan perbaikan.</p>
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	<p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	<p>kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon</p> <p>Terencananya pelaksanaan kegiatan, koordinasi dengan Pemerintah Desa, kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon</p>

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kerjasama yang baik antar petugas di Kapanewon
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan;
		Terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi pelayanan kapanewon.
		Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
		Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang.
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga kemasyarakatan, kapanewon, dinas/instansi se-kapanewon.
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon (masyarakat, pelaku UMKM, kalurahan)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama yang baik dengan masyarakat, pelaku UMKM, Kalurahan
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon Pajangn)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terencananya koordinasi pengendalian wilayah dan pelaksanaan kegiatan; Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon, dan forkompinkap. Terjalinnnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terencananya pelaksanaan kegiatan. Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar dan kerjasama yang baik antar Stakeholders di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja

program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pajangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-

2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM Kapanewon	Angka	94,75	95,26	95,82	96,02	-
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	N/a	n/a	3,70	3,80
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	92,65	92,87

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pajangan Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pajangan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon.
2. Terencananya pelaksanaan kegiatan pelayanan.
3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan.
4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Pajangan Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Pajangan, maka diperlukan perbaikan dan penambahan

sarana dan prasarana yang memadai, antara lain adanya pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak di depan ruang pelayanan, dan penyediaan ruang laktasi untuk ibu-ibu menyusui. Juga masih diperlukan sarana prasarana untuk memfasilitasi masyarakat disabilitas yang melaksanakan pelayanan di kapanewon. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pajangan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani. Pelaksanaan registrasi secara digital dengan komputerasi terhadap berbagai jenis pelayanan di Kapanewon Pajangan untuk mengurangi penggunaan buku secara manual.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran, email, instagram, email, dan SP4N - Laporan. Dengan adanya berbagai macam sarana pengaduan tersebut diharapkan tindak lanjut aduan yang cepat dan tepat. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pajangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen melayani dan menjalankan;2. Tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;3. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;5. Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon;6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;7. Terdapat Forum Forkompinkap; Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;2. Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah;3. Keterbatasan sarana prasarana;4. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;5. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;6. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang		Tantangan/Ancaman	
1.	Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan	1.	Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
2.	Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR); Program pembangunan dari dana aspirasi	2.	Pelanggaran aturan dan ketentuan; Masih terjadi gangguan kamtibmas
3.	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan.	3.	Pendampingan dan fasilitasi dari kapanewon terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kurang intens, tidak terjadwal rutin.
4.	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	4.	Akses permohonan pembangunan masyarakat bisa lewat berbagai akses, pembangunan dari PIK, Dais, Kalurahan, atau sumber lain harus dikoodinasikan/ diidentifikasi terlebih dulu, agar kegiatan yang dilaksanakan tidak sama atau tidak dalam lokasi/sasaran yang sama.
5.	Program pembangunan kewilayahan OPD	5.	Keterbatasan akses kewilayahan hanya pada fasilitasi dan koordinasi
6.	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	6.	Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
7.	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon (Obyek wisata alam, sejarah/religi, sentra kuliner)	7.	Terbengkalai obyek wisata, sehingga tidak mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat

Peluang		Tantangan/Ancaman	
8.	Potensi produk-produk unggulan setempat, banyak terdapat pelaku UMKM (Makanan mentah, gula jawa, minuman, batik kayu, blankon, dll)	8.	Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;
9.	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro.	9.	Potensi obyek wisata kurang berkembang
		10.	Gesekan kepentingan antar masyarakat;
		11.	Potensi wisata sejenis yang banyak terdaat di daerah lain.
		12.	Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;
5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;

6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Pajangan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 Persen	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Pajangan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 Persen	100,000,000	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan		0	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100 Persen	100,000,000	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Dokumen	0	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Pajangan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	116,040,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Pajangan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	35,996,000	
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	83 persen	50,000,000	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		0	
2	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		0	
3	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66,040,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	0	
3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		0	
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100 persen	0	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100 Persen	35,996,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		0	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4 Dokumen	35,996,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Pajangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,38 Indeks	3,543,274,362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Pajangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,38 Indeks	3,347,011,711	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,02 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,02 Indeks		
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	82 persen	23,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	6,180,000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	8,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3,090,000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,090,000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2,491,174,362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2,780,761,857	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,429,174,362	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,722,671,857	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	57,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53,090,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5,000,000	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	3,360,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	3,400,000	
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,360,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,400,000	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	305,440,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	190,688,709	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,526,860	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	53,909,749	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	33,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,959,780	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	33,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,078,700	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	154,090,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	106,818,620	
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	3,295,000	
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1,700,000	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	145,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	15,000,000	
19	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	45,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	15,000,000	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	280,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	211,395,580	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43,200,000	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	70,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11,170,000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	153,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	157,025,580	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	295,300,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	139,585,565	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	145,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	133,802,700	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	5,782,865	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Pajangan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	81 persen	255,500,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Pajangan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	81 persen	31,450,000	
11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 persen	175,500,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 persen	16,450,000	
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	80,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	7,100,000	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	95,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	9,350,000	
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon	100 persen	80,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100 persen	15,000,000	
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	80,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Pajangan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	100 persen	281,211,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Pajangan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	100 persen	112,402,500	
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Cakupan pemberdayaan masyarakat kalurahan	100 persen	183,711,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Cakupan pemberdayaan masyarakat kalurahan	100 persen	85,000,000	
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	85,211,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	98,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	65,000,000	
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	100 Persen	97,500,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	100 Persen	27,402,500	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	97,500,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	27,402,500	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Pajangan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	194,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Pajangan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	15,000,000	
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon.	100 persen	194,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon.	100 persen	15,000,000	
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	194,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Pajangan	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	200,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Pajangan	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	210,000,000	
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	200,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	210,000,000	
33	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	200,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	210,000,000	
	JUMLAH					4,590,025,362				3,851,860,211	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki
5. Pemberantasan kemiskinan.	
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
<p>8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.</p> <p>9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.</p> <p>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.</p> <p>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</p> <p>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</p> <p>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</p> <p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)</p>	<p>sekolah-sekolah yang perlu renovasi.</p> <p>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</p> <p>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.</p> <p>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</p>

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
<p>termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</p>	

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pajangan;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan

Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,65	92,87

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Bantul

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Kapanewon Pajangan						3.733.239.627,00					3.786.678.518,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00					100.000.000,00			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00					100.000.000,00			
1	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-				100 Persen	100.000.000,00				100.000.000,00			
	2	22	08	5.0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	-				100 %	100.000.000,00				100.000.000,00			
	2	22	08	5.0 7	000 6	Gelar Budaya Jogja													
						Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM	100.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.996.000,00				35.000.000,00			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							35.996.000,00				35.000.000,00			
2	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-				100 Persen	35.996.000,00				35.000.000,00			
	4	01	04	5.0 1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di kapanewon/ Kemantren dan kalurahan/ yang Didampingi	-				100 %	35.996.000,00				35.000.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4 01 04 5.0 000 1 7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	35.996.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan		35.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.597.243.627,00							3.651.678.518,00	
	7 01	KECAMATAN							3.597.243.627,00							3.651.678.518,00	
3	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-			81,05 Angka 96,01 Indeks	3.281.142.927,00						-	3.366.428.317,00		
	7 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 %	6.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	-	6.490.000,00		
	7 01 01 2.0 000 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	3.090.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		3.090.000,00	KAPANEWON PAJANGAN	
	7 01 01 2.0 000 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.955.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		3.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	9.518.900,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		10.404.600,00	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.972.900,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		8.492.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		24.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	100.552.500,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		127.221.258,00	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.810.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		5.385.000,00	KAPANEWON PAJANGAN				
7	01	01	2.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		3.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN				
7	01	01	2.0	001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-				100 %	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	-	9.500.000,00	
7	01	01	2.0	000	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		9.500.000,00	KAPANEWON PAJANGAN				
7	01	01	2.0	008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	203.145.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	-	204.682.180,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.163.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		44.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7 01 01 2.0 000 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	11.920.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		12.020.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7 01 01 2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	148.062.180,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		148.262.180,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7 01 01 2.0 000 8 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 %	135.436.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		140.341.746,00	
	7 01 01 2.0 000 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	130.399.300,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		131.249.300,00	KAPANEWON PAJANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
											judi, dan penyeludupan.									
7	01	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			9	9			2	5.037.600,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		9.092.446,00	KAPANEWON PAJANGAN				
4	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	-				81 Persen	29.062.500,00					27.069.497,00			
7	01	02	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-				100 %	17.725.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompinka p	-	17.725.000,00	
7	01	02	2.0	000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			1	1		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 Laporan	7.100.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompinka p		7.100.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	02	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			1	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					7 Dokumen	10.625.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompinka p		10.625.000,00	KAPANEWON PAJANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	02	2.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon	-				100 %	11.337.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	-	9.344.497,00	
	7	01	02	2.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan															
				000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					2 Laporan	11.337.500,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	-	9.344.497,00	KAPANEWON PAJANGAN
5	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	-				100 Persen	133.182.500,00						-	100.532.135,00	
	7	01	03	2.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	-				100 %	97.855.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	-	75.032.135,00	
	7	01	03	2.0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
				000		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10 Lembaga Kemasyarakan	21.759.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	-	20.200.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7	01	03	2.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
				000														-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	76.096.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		54.832.135,00	KAPANEWON PAJANGAN				
7	01	03	2.0	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	-				100 %	35.327.500,00					UMKM, Kalurahan , dan Kapanewon	-	25.500.000,00	
7	01	03	2.0	000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												3	4		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	35.327.500,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	UMKM, Kalurahan , dan Kapanewon		25.500.000,00	KAPANEWON PAJANGAN				
6	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-				100 %	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	-				100 %	10.000.000,00					Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	-	11.000.000,00	
7	01	04	2.0	000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												1	1		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		11.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN	
7	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 Persen	143.855.700,00						-	146.648.569,00		
	7 01 05 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	-			100 %	143.855.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	-	146.648.569,00		
7	01 05 2.0 000 1 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	143.855.700,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		146.648.569,00	KAPANEWON PAJANGAN	
							J U M L A H	3.733.239.627,00								3.786.678.518,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU KAPANEWON PAJANGAN



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM.

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 197101101990031002